



Perkembangan Instrumen Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

Hidayatul Amaliyah¹, Faries Adjie Prayogie², Khoirotul Islamiyah³, Agus Eko Sujianto⁴
^{1,2,3,4}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: hdylamalyh13@gmail.com¹

Abstract. *Infrastructure development plays an important role for the prosperity of society. SBSN is issued with the aim of financing the State Budget including infrastructure development. This research was conducted to determine the linkages of sukuk in infrastructure development in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach, namely reviewing, analyzing, looking for problem theories that are related to the research theme. The data used is data sourced from literature or references. The analysis technique in this study uses a technique that combines concepts and theories regarding the development of sukuk, infrastructure development, as well as the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), and State Sharia Securities (SBSN). The research finding is that state sukuk have an important influence on funding infrastructure development with the PBS (Project Based Sukuk) and Retail State sukuk series.*

Keywords: *State Sukuk, Infrastructure Development, APBN.*

Abstrak. Pembangunan infrastruktur berperan penting untuk memakmurkan masyarakat. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan sukuk dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah, mencari teori permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Adapun data yang digunakan adalah data yang bersumber dari literatur atau referensi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik menggabungkan antara konsep dan teori tentang perkembangan sukuk, pembangunan infrastruktur, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Temuan penelitian yaitu sukuk negara berpengaruh penting untuk mendanai pembangunan infrastruktur dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) dan sukuk Negara Ritel.

Keywords: Sukuk Negara, Pembangunan Infrastruktur, APBN

LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur merupakan indikator penting bagi suatu Negara. Karena dengan program pembangunan infrastruktur dapat menggegas pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan pekerjaan. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi pada periode tertentu. Untuk itu, tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan, swasta serta masyarakat sangat dibutuhkan agar terlaksananya pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Indonesia setelah mengalami krisis ekonomi disebabkan karena pandemi menjadikan penggunaan instrumen utang semakin memprihatinkan. Membutuhkan waktu dan dana untuk melakukan *rebalancing* demi mencapai tujuan awal. Sementara itu, kegiatan pembangunan diarahkan untuk mencapai kemakmuran yang merata. Dengan keterbatasan anggaran Negara saat ini, pemerintah diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.



Grafik 1. Besaran Anggaran Infrastruktur 2015-2022

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Secara umum, pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, namun tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk bergantung selamanya kepada dana APBN, sehingga pemerintah harus mencari alternatif. Untuk itu, pemerintah membutuhkan pembiayaan lain yang aman dan bebas dari utang luar negeri, maka pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk Negara. Sukuk Negara merupakan instrumen keuangan pada pasar modal syariah sekaligus instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sukuk Negara dalam pembiayaan APBN digunakan untuk mempercepat

berbagai pembangunan infrastruktur yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Di Indonesia perkembangan sukuk telah pesat dimulai pada tahun 2002 mencapai Rp 175 miliar, meskipun jika dibandingkan dengan pasar konvensional masih sangat kecil (Fatah, 2011). Per Januari 2022 sukuk telah mencapai Rp 35,02 Triliun berdasarkan Data Statistik Obligasi Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanfaatkan dengan optimal pembiayaan SBSN untuk proyek yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi dengan memaksimalkan konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia (Kementerian PUPR, 2021). Dengan diterbitkannya SBSN sebagai sumber pendanaan dalam negeri, para kontraktor dan konsultan orang Indonesia terlibat sepenuhnya dimana akan berdampak pada kemandirian Negara dalam pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan pinjaman bilateral dan multilateral yang mana kontraktor dan konsultan dari Negara yang memberi pinjaman.

Dari pembiayaan infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian bahwa hasil pembangunan infrastruktur saat ini akan menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Untuk itu, pemerintah hendaknya menyertai warisan dengan instrumen yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sehingga, warisan tersebut menghasilkan kebermanfaatannya sekaligus mendapatkan sumber pengembalian pada pembiayaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan instrumen sukuk dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan diartikan dengan proses yang memungkinkan untuk melakukan perubahan, mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Michael P. Todaro telah menganalisis bahwa pembangunan mengandung tiga nilai utama, yaitu kecukupan untuk menunjang kelangsungan hidup (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*) kemampuan untuk menjadi seorang manusia seutuhnya, kemerdekaan atau kemampuan untuk memilih kebebasan (*freedom*).

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi pendapatan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi ditandai dengan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, akan tetapi

pertumbuhan ekonomi tersebut masih bersifat umum, belum mampu mencerminkan masyarakat secara individual. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi suatu Negara harus merata dan memberikan dampak positif untuk tiap daerah.

Konsep Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur berperan penting untuk memakmurkan masyarakat. Hubungan pembangunan ekonomi dengan infrastruktur saling berkaitan. Beberapa pakar ekonom menyebutkan, salah satunya Hirschman mendefinisikan bahwa infrastruktur sangat dibutuhkan. Tanpa adanya infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor industri tidak dapat berjalan (Keusuma, 2015). *Sustainable Development Goals* merupakan wujud implementasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk memenuhi komitmen Indonesia. Namun, tidak hanya itu, implementasi infrastruktur berkelanjutan juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah undang-undang, sehingga terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. APBN. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Konsep Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan sebagai sumber dana pembangunan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum angka 1 dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Surat Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Maula Robin Haq, Diah Putri F.S. dan Kharis Fadhullah H. (2020) melakukan penelitian dengan judul “Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur” menjelaskan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur. Dengan adanya sukuk, pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkannya sebagai sumber alternatif pembiayaan infrastruktur dan mengurangi

ketergantungan pada hutang luar negeri, sebagaimana sukuk yang menggunakan prinsip syariah sehingga terhindar dari riba ataupun hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

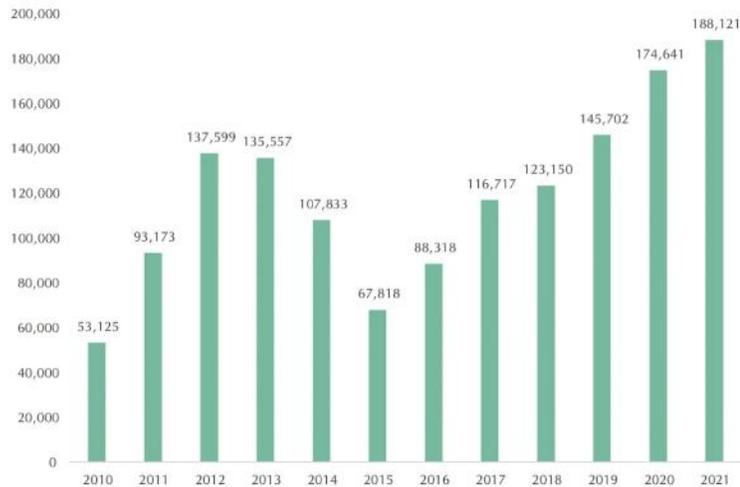
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji, menelaah, mencari teori permasalahan yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan, serta literatur yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada kondisi lapangan yang diteliti.

Adapun data yang digunakan adalah data yang bersumber dari literatur atau referensi, baik itu yang termuat di jurnal, makalah ilmiah, ensiklopedia, serta sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik menggabungkan antara konsep dan teori tentang perkembangan sukuk, pembangunan infrastruktur, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia

Sukuk merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah yang digunakan untuk modal serta pembiayaan suatu proyek. Untuk membantu pembiayaan infrastruktur maka diperlukan sukuk Negara. Penerbitan sukuk Negara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan sukuk global menunjukkan peningkatan satu digit sekitar 7,72% p.a. atau USD 174,641 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 188,121 miliar pada tahun 2021. Penerbitan sukuk negara dari Asia, GCC, Afrika, dan yurisdiksi tertentu mengalami pertumbuhan pada tahun 2021. Sementara Malaysia mendominasi pasar sukuk meskipun pangsa negara seperti Indonesia, UEA, Arab Saudi, dan beberapa lainnya mengalami peningkatan volume.



Grafik 2. Total Global Sukuk Issuance

Sumber: IIFM, 2022

Sesuai data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, per Juli 2020 pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk sebesar Rp 1.041 triliun. Sementara, pada Juni 2020, penerbitan didominasi sukuk negara sebesar Rp 863,43 Triliun dibandingkan dengan sukuk non-negara. Dari tahun ke tahun perkembangan sukuk negara di Indonesia mengalami kenaikan terus menerus dan *outstanding* sukuk pun ikut mengalami kenaikan, hal ini mengakibatkan pemerintah berupaya untuk menambah likuiditas dari sukuk negara dengan cara menambahkan *supply* yang memadai.

Pada perkembangannya, Sukuk Negara mengaplikasikan beragam produk bersama kontrak berbeda-beda sebagaimana yang telah ditentukan oleh SBSN. *Ijarah Fixed Rate* (IFR) merupakan bentuk sukuk yang memakai kontrak sewa dengan tarif tetap. *Sukuk Ritel* (SR) merupakan suku yang diterbitkan setelah IFR muncul pada tahun 2009 yang menggunakan skema sama dengan IFR dengan tujuan untuk mengapai investor individu di Indonesia. Sebaliknya *Sukuk Nasional Indonesia* (SNI) bertujuan untuk investor asing. Penerbitan *Sukuk Dana Haji Indonesia* (SDHI) dilakukan pada tahun yang sama setelah SR muncul, SDHI tidak diperjualkan belikan namun digunakan sebagai *private placement* pada pengolahannya di dana haji. Setelah itu pada tahun 2011 *Sukuk Perbendaharaan Negara Syariah* (SPN-S) diterbitkan oleh pemerintah yang dikenal sebagai *Islamic T-Bills*. Ditahun berikutnya *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan.

Mulai tahun 2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperkenalkan konsep *green* sukuk. Sukuk ini menjadi adaptasi dari *green bond* yang sudah ada. *Green* Sukuk bertujuan untuk membiayai proyek ramah lingkungan untuk mengurangi dampak pemanasan global, termasuk proyek yang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon (infrastruktur hijau), seperti membangun proyek pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, dan panas bumi. Juga termasuk proyek untuk membangun sistem angkutan massal untuk komuter. Di sisi lain, utang Indonesia pada 2017 mencapai Rp 3.600 triliun, jika negara meningkatkan penerbitan obligasi syariah, negara akan mendapat banyak bantuan. Dapat dikatakan bahwa penerbitan sukuk merupakan bentuk kemandirian fiskal negara, karena pembelian sukuk nasional khususnya oleh masyarakat Indonesia atas sukuk ritel merupakan bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan negara (Laila,N: 2019).

Perkembangan Infrastruktur di Indonesia

Program pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi angka kesenjangan antar wilayah dan mewujudkan keadilan ekonomi secara merata. Indonesia sebagai Negara kepulauan, Negara seribu candi, Negara maritim, Negara agraris, dan masih banyak lagi julukannya. Indonesia harus memperbanyak dan membangun proyek-proyek infrastruktur dengan teknologi modern agar lebih produktif, efisien, dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.



Grafik 3. *World Competitiveness Ranking 2022*

Sumber: *BusinessWorld*

Melihat dari kompetisi negara dengan indikator infrastruktur bisa disimpulkan jika Indonesia dibidang masih tertinggal dari negara tetangga. Terlebih lagi masih ada kemungkinan terjadi gap atau kesenjangan infrastruktur di Indonesia. Karena hal tersebut, beberapa tahun belakangan ini pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Namun, terdapat kendala pada inovasi di sektor keuangan untuk sumber pendanaan yang digunakan sebagai pembiayaan infrastuktur. Salah satunya di sektor keuangan syariah, akan tetapi di keuangan syariah di Indonesia masih sedikit dan belum tersentuh oleh masyarakat pedesaan. Sehingga, karena hal tersebut maka dapat berkembang terus menerus. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak yang dapat menghasilkan potensi di *market size*.

Peran Strategis Sukuk Negara Terhadap Pembiayaan Infrastruktur

Menurut Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, sukuk Negara memiliki peran yang strategis diantaranya sebagai sumber pembiayaan Negara dan instrumen investasi syariah termasuk jenis sukuk didalamnya yaitu Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Sukuk Ritel yang ditawarkan kepada individu warga Negara Indonesia.

Selain itu, penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) kini menjadi sarana pembiayaan utama, sedangkan pembiayaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Surat Berharga Negara (SUN) dan pinjaman langsung. Meskipun SBSN merupakan instrumen baru, namun keberadaannya tidak tumpang tindih dengan pembiayaan lainnya. Bahkan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin memperkuat kapabilitas pemerintah dalam membiayai defisit anggaran. Pemerintah memiliki beberapa opsi dalam menentukan bauran alat mereka dengan pembiayaan agar pemerintah dapat berupaya meminimalkan biaya utang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) (Hariyanto, 2017).

Dampak penerbitan sukuk negara bukan sekedar memenuhi tujuan pembiayaan defisit anggaran negara (WPBN). Namun, pemberian sukuk negara juga memiliki fungsi strategis atau efek menguntungkan lainnya terkait dengan pemberian sukuk negara. Dalam delapan tahun pelaksanaan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terdapat beberapa dampak strategis, di antaranya (Hariyanto, 2017):

- a. Mendorong pengembangan industri keuangan nasional berbasis syariah. Beberapa akademisi menyoroti pentingnya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bagi perkembangan industri keuangan syariah. Kehadiran sukuk negara di sektor

perbankan syariah sebagai bagian dari penyediaan perbankan syariah yang aman memiliki dampak positif dan signifikan terhadap rasio total pendanaan bank syariah terhadap PDB, yang mengukur perkembangan negara pada sektor perbankan syariah (Azwar, 2014). Ketersediaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kini menjadi alternatif investasi bagi sektor keuangan syariah yang mengalami kelebihan likuiditas sejak atau ingin mengembangkan usahanya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, sesuai dengan Peraturan Likuiditas, industri keuangan syariah dapat memperdagangkan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) di bawah sesuai kebutuhan. Berbagai jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersedia saat ini, jangka pendek (6 bulan) dan jangka panjang (lebih dari 10 tahun). Ketersediaan diversifikasi jangka panjang ini memudahkan industri untuk mengelola portofolio investasinya.

- b. Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan Sukuk Negara seri dengan menggunakan *underlying asset* berupa proyek infrastruktur untuk menambah ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya dimasukkan ke dalam rekening pengeluaran pemerintah, sebagian telah dihapus dari pos pembiayaan. Hal ini meningkatkan cakupan belanja pemerintah pasca-1 yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur lainnya. Dengan demikian, pada tahun anggaran akan semakin mencakup proyek-proyek negara yang dapat dibiayai baik melalui pos-pos pengeluaran maupun melalui pembiayaan bersama. Pemerintah berencana untuk lebih fokus menerbitkan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, kemampuan warga untuk menyerap penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga akan meningkat. Pemanfaatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan infrastruktur juga membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk membantu pembangunan bangsa.
- c. Mempromosikan pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) yang baik. Kebutuhan untuk menyediakan aset yang mendasari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbentuk Barang Milik Negara (BMN) telah mendorong penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik. *Underlying asset* dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) harus bebas dari sengketa kepemilikan (*clean*) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (*clear*) seperti bukti kepemilikan, dll. Persyaratan ini mendorong kementerian/lembaga untuk memastikan kelengkapan administrasi agar

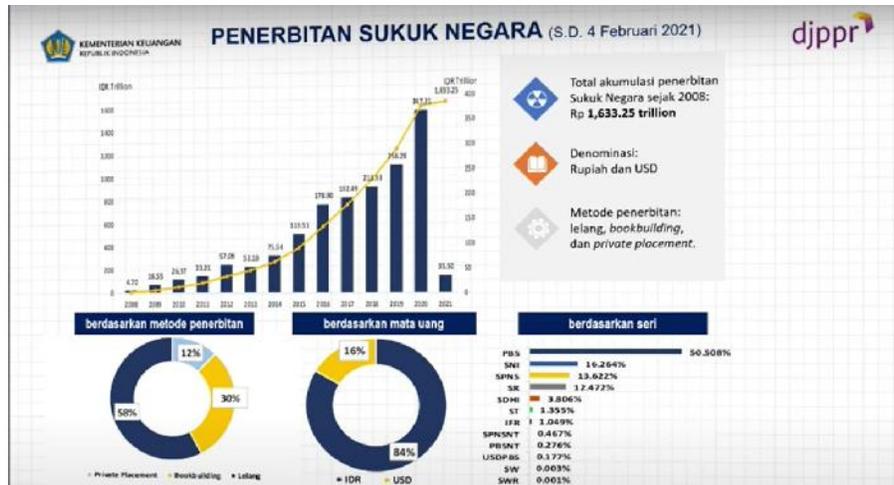
Barang Milik Negara (BMN) berstatus *clean and clear*. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* telah mendorong instansi pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan baik aset yang dimilikinya. Hal ini akan sangat meningkatkan akuntabilitas aset pemerintah. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) juga mendorong Kementerian Keuangan untuk menilai kembali aset milik pemerintah agar diketahui harga sebenarnya dari aset milik pemerintah tersebut. Dengan revaluasi aset, maka terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki pemerintah.

- d. Mempromosikan manajemen proyek infrastruktur pemerintah yang tepat. Selain itu, dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, *underlying asset* digunakan sebagai nilai dasar untuk mendorong manajemen proyek yang lebih terstruktur, terutama yang berkaitan dengan kemajuan proyek dan penggalangan dana yang direncanakan. Penyelesaian proyek tepat waktu adalah persyaratan Syariah sebagaimana didefinisikan dalam struktur perjanjian yang digunakan. Tidak menyelesaikan proyek tepat waktu berarti melanggar kontrak yang diatur didalam dan karenanya harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih rumit.
- e. Menambah sarana investasi alternatif bagi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan dan non keuangan, serta individu masyarakat Indonesia sangat membutuhkan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai asetnya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat menarik karena pemerintah menjamin pembayaran pengembalian dan pokok investasi, sehingga dapat dikatakan sebagai sarana investasi bebas risiko (*zero risk*). Selain bebas risiko, berinvestasi di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan berinvestasi di instrumen investasi yang memiliki karakteristik hampir sama dengan deposito. Bahkan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) cenderung menawarkan imbal hasil yang lebih menggiurkan dibandingkan instrumen deposito Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada investor ritel atau individu, SBSN secara tidak langsung telah mendukung pengembangan keuangan inklusif. Keberadaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bagi investor perorangan, seperti Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan Negara, memudahkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan asetnya sendiri.
- f. Dukungan BI dalam melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT). Untuk menjaga laju inflasi (*inflation targeting*), Otoritas Moneter (BI) telah mengambil sejumlah langkah, termasuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Biasanya, BI

melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Untuk melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT), BI memerlukan beberapa alat untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Saat ini dengan tersedianya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka pendek (6 bulan) BI dapat menggunakan *tools* tersebut untuk melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT). Bank Indonesia dapat memperoleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah melakukan lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) jangka pendek atau biasa disebut Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S). Setelah melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT), BI dapat menggunakan SPN-S untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara menukarkannya dengan sektor keuangan, khususnya perbankan. Jika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, BI bisa menjual SPN-S ke bank. Sebaliknya, jika BI ingin menambah jumlah uang beredar, BI dapat membeli kembali SPN-S di sektor keuangan dengan mentransfer uang tersebut ke masyarakat. Penggunaan SPN-S akan digunakan khususnya pada saat BI akan melakukan *Open Market Operation* (OMO) dengan mitra di sektor keuangan syariah. Hal ini dikarenakan industri keuangan syariah hanya bisa menerima instrumen keuangan syariah sebagai portofolio aset.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa sukuk negara merupakan instrumen investasi syariah yang telah ada sejak tahun 2008 di Indonesia. Surat Berharga Syariah Negara diterbitkan untuk mendanai APBN termasuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Sepanjang 13 tahun ini, perkembangan sukuk Negara mencapai Rp 1.633,25 Triliun berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan. Dari angka tersebut, Rp 206,61 Triliun berasal dari sukuk ritel yang ditawarkan pada individu di seluruh Indonesia.



Grafik 4. Penerbitan Sukuk Negara

Sumber: Paparan DJPPR Kemenkeu

Dalam memenuhi tujuan dari pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan pembangunan infrastruktur secara signifikan di Indonesia. Dikutip dari laporan *World Bank*, pada 15 tahun kedepan yaitu tahun 2016-2030, bahwa perekonomian global akan membutuhkan investasi di bidang infrastruktur sekitar USD90 Triliun. Dengan adanya kenaikan kebutuhan tersebut yang disebabkan oleh infrastruktur di negara-negara berkembang yang populasinya terus menerus bertambah hingga mengakibatkan celah infrastruktur (*infrastructure gap*) membengkak. Celah infrastruktur adalah selisih antara kebutuhan infrastruktur dengan tingkat ketersediaan yang ada (World Bank, 2017).

Kedudukan sukuk dalam mendanai pembangunan infrastruktur juga semakin meningkat. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pendanaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, banyak pemerintah memperluas pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara. Hal itu dicapai dengan penerbitan sukuk negara berdasarkan pendanaan proyek atau sukuk negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2012 juga diterbitkan sukuk Negara Ritel yang digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

Pembiayaan proyek memanfaatkan SBSN PBS sebagai alat. Kemudian, para investor atau masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai investasi. Langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan diperkenalkan SBSN PBS sebagai alat untuk berinvestasi yang dapat dilakukan masyarakat. Namun, selama ini masyarakat mengenal SBSN PBS hanya sebagai sumber pembiayaan hutang, maka yang menjadi PR pemerintah yaitu merubah pola pikir tersebut dengan mengambil sudut pandang dari investor

atau masyarakat yang disebut dengan instrumen investasi. Sebab, itu dapat memberikan informasi kepada masyarakat jika dengan mereka membeli sukuk akan mendapatkan imbalan atau keuntungan. Dengan pembelian sukuk tersebut secara tidak langsung masyarakat berpartisipasi untuk pembangunan nasional secara aktif dan nyata.

Tetapi hal tersebut yang perlu diperhatikan yaitu pada kesiapan proyek yang akan dibiayai oleh SBSN PBS. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sukuk negara sudah terbit namun proyek belum siap. Apalagi karakteristik dari proyek infrastruktur membutuhkan biaya investasi yang besar, menghasilkan return dalam jangka panjang, minimnya minat swasta dalam berpartisipasi, hingga mekanisme persiapan dan perencanaan lebih kompleks dibanding proyek lain. Terlebih jika ada ketidaksamaan pada waktu penerbitan sukuk dan realisasi proyek bisa memunculkan resiko sampai-sampai berpengaruh pada penurunan kepercayaan dari para investor.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian, sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terbukti berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Pemerintah menggunakan instrumen sukuk untuk membantu pembangunan infrastruktur guna meminimalisir kesenjangan ekonomi di Indonesia. Karena, melihat dari *World Competitiveness Ranking 2022*, Indonesia masih terbelang tertinggal dengan negara lain yang perkembangan infrastrukturnya sudah tinggi.

Keberadaan sukuk negara dalam mendanai pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan. Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Pendanaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, banyak pemerintah memperluas pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara. Hal itu dicapai dengan penerbitan sukuk negara berdasarkan pendanaan proyek atau sukuk negara dengan seri PBS (*Project Based Sukuk*) pada tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2012 juga diterbitkan sukuk Negara Ritel yang digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik dan Iin Emy Prastiwi. 2017. "Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Online), 3(03): 1, (<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>).
- Business World. 2022. "World Competitiveness Ranking 2022" dalam World Competitiveness Ranking 2022 - BusinessWorld Online (bworldonline.com), diakses 20 Mei 2023.
- Dewi, Hanum Kusuma. 2021. Perjalanan Sukuk Ritel 13 Tahun, Raup Rp 204,61 Triliun, dalam <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2021-02-26/perjalanan-sukuk-ritel-13-tahun-raup-rp20461-triliun>, diakses 20 Mei 2023.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 2021. *Tahun 2021 Pembiayaan SBSN untuk Infrastruktur di Kementerian PUPR Rp 14,76 Triliun*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Penyusun APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. 2012. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, Edisi II*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauziah, Syifa dan Nurwahidin. 2020. "Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara di Indonesia: Prosedur dan Struktur". *Jurnal Ilmiah MEA*, (Online), Vol. 2 No. 1: 31-32, (<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/233>).
- Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha. *Menggagas Pembiayaan Sukuk dalam Skema KPBU, untuk APBN yang Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha. 2022. *Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan: Aspek, Pembiayaan, dan Manfaat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khairunnisa, Novia. Hafas Furqani. Dara Amanatillah. 2017. "Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia)". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, (Online), Vol. 1, No. 2: 14-23, (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>).
- Laila, N. 2019. *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. Nizamia Learning Center, Surabaya, Indonesia.
- Mustafika, Rifda. 2023. "Smart Sukuk dan Perannya dalam mendukung pengembangan UMKM" dalam Smart Sukuk dan Perannya dalam mendukung pengembangan UMKM (alami.institute), diakses 20 Mei 2023.
- Nopijantoro, Wurjanto. 2018. "Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur". *Subtansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, Vol. 1 No. 2: 400-404, (<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/259/pdf0>).
- Sari, D. P. F., & Hana, K. F. (2020). Peran sukuk terhadap pembangunan infrastruktur. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 87-103. Hal 100.
- Todaro, MP dan Smith, SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 9 Jilid 1. Terjemahan Haris Munandar. Erlangga:Jakarta.